

**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR PADA KANTOR UPT. BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
WILAYAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 – 2018**

**Vinia Tiara Aristi<sup>1</sup>, Titin Ruliana<sup>2</sup>, Ida Rahmawati<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email: viniatiara@gmail.com**

---

**ABSTRACT**

**Keywords :**

*Optimization, Regional Original Income, Motor Vehicle Tax*

*Optimization of Regional Original Income (PAD) Motor Vehicle Tax at the UPT office. BAPENDA of East Kalimantan Province, Kota Samarinda Region 2016 - 2018 (under the Guidance of First Advisor, Mrs. Titin Ruliana and and Second Advisor, Mrs. Ida Rahmawati).*

*Optimization is an effort to increase the ability that is most desired among the criteria of creativity or in other words, an effort to maximize the existing resources to achieve the expected goals. The definition of Regional Original Income (PAD) is regional revenue that comes from regional taxes, the results of regional management, and other legitimate regional original revenues, which aim to provide graduation to the daetah in assisting the implementation of regional autonomy as the embodiment of the principle of being centralized.*

*The research objective achieved is to determine the target of local tax revenue in the motor vehicle tax sector at UPT. Bapenda of East Kalimantan Province and analyzes whether the average target performance for 2016-2018 is very optimal when viewed from the percentage of realization of target revenue target PKB UPT Bapenda East Kalimantan Province.*

*Based on the research background that has been described, a research hypothesis can be formulated which states that the level of revenue from the local tax revenue target in the Motor Vehicle Tax Sector at UPT Bapenda East Kalimantan is very optimal.*

*The performance of the realization of local tax revenue targets through the motor vehicle tax sector at the UPT Bapenda of East Kalimantan Province in 2016-2018 is very optimal, which is above 80%.*

---

## PENDAHULUAN

Setiap pajak daerah pada pelaksanaannya telah di atur dalam peraturan daerah. Dalam peraturan daerah ini diatur semua yang menyangkut tentang subjek, objek, tarif serta bagaimana aturan pelaksanaannya. Salah satu kebijakan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan Undang-undang tersebut maka Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota telah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri melalui sistem Otonomi Daerah. Masing-masing daerah tertentu berusaha untuk mengisi pundi-pundi anggarannya yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), perolehan dana melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berupa Pajak Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu pajak daerah yang telah memberikan hal signifikan pada pendapatan daerah. Namun adanya permasalahan yang terjadi terkait pajak kendaraan bermotor pada kota Samarinda sehingga mengalami penurunan atau tidak mencapai target yang telah ditentukan setiap tahunnya

Diperlukan upaya-upaya optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah baik dari segi sistem pemungutan, ketentuan pengenaan PKB, dan ketentuan lainnya yang dapat mengoptimalkan pendapatan dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan adalah peningkatan jumlah wajib pajak, penerimaan pajak serta inovasi dalam sistem pembayaran pajak. Dalam penerimaan pajak juga harus didukung dengan situasi sosial yaitu tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini juga harus didukung dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak sangat diperlukan dimana pajak sangat berkontribusi besar dalam penerimaan maupun pendapatan daerah Kalimantan Timur khususnya daerah Samarinda.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT. Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kota Samarinda Tahun 2016-2018”.

### **1. Pengertian Manajemen Keuangan**

Setiap perusahaan selalu membutuhkan biaya dalam rangka memenuhi kebutuhan operasi perusahaan, agar memenuhi kebutuhan tersebut perusahaan harus mampu mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya paling murah.

Menurut Martono dan Harjito (2011:4): “Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana,

menggunakan dana dan mengolah asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh”.

## **2. Pengertian Anggaran Daerah**

Menurut Mardiasmo (2018: 9) Anggaran daerah adalah: Rencana pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya mengembangkan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Pada hakikatnya APBD merupakan instrument kebijakan yang dipakai untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

## **3. Pengertian Keuangan Pemerintah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Pengukuran kinerja yang digunakan secara umum oleh perusahaan yang berorientasi pada pencapaian laba antara lain melalui penetapan rasio keuangan. Rasio yang dimaksud dalam laporan keuangan adalah Suatu angka yang menunjukkan hubungan antarasuatu unsur dengan unsur lainnya. Suatu rasio tersebut diperbandingkan dengan perusahaan lainnya yang sejenis, sehingga adanya perbandingan ini maka perusahaan tersebut dapat mengevaluasi situasi perusahaan dan kinerjanya.

## **4. Kinerja Keuangan Daerah**

Konsep kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kinerja menurut Indra Bastian (Fahmi,2013: 128) menyatakan bahwa Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, fungsi, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema yang strategis (strategic planning) suatu organisasi. Menurut Mahsun (2012:25) : “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang teruang dalam *stategic planning* suatu organisasi.”

## **5. Pengertian Optimalisasi**

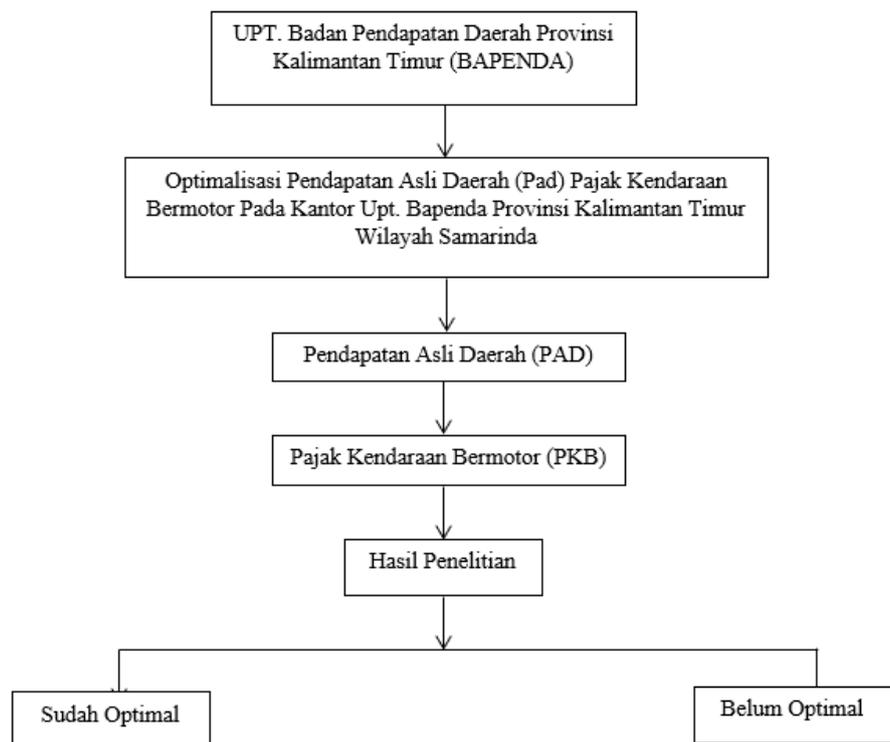
Optimalisasi (*Optimalization*) menurut Gibson dalam Budiyani (2010:12) : Upaya untuk meningkatkan kemampuan yang paling diinginkan diantara kriteria kreatifitas atau dengan kata lain upaya untuk memaksimalkan sumber-sumber yang telah dimiliki untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dengan demikian, optimalisasi dapat diartikan sebagai upaya, proses, cara dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan, sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

## 6. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 12 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengungkapkan bahwa Pajak kendaraan bermotor adalah: “Pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor”. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tercantum pada pasal 1 ayat (15) Pajak kendaraan bermotor adalah Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

## Kerangka Pikir



Gambar 1 : Kerangka Pikir

## Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pencapaian target dari penerimaan Pajak Daerah pada Sektor Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 dikatakan belum Optimal.
2. Tingkat pencapaian target dari penerimaan Pajak Daerah pada Sektor Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 dikatakan belum Optimal.
3. Tingkat pencapaian target dari penerimaan Pajak Daerah pada Sektor Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 dikatakan belum Optimal.

## METODE PENELITIAN

### 1 Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan perhitungan Tingkat Pencapaian Target untuk mengetahui seberapa optimal dan tidaknya pencapaian dari penerimaan Pajak Daerah pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Adapun rumus Tingkat Pencapaian Target yaitu :

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Sumber : Depdagri, kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2016

*Keterangan :*

P = Tingkat Pencapaian Target

F = Realisasi Penerimaan Pajak

N = Target Anggaran Pendapatan

Kriteria yang digunakan dalam tingkat penilaian pencapaian penerimaan pajak daerah pada sektor pajak kendaraan bermotor adalah :

**Tabel 2 Kriteria pencapaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Presentase	Keterangan
>100%	Sangat Optimal
91%-100%	Optimal
81%-91%	Cukup Optimal
60%-80%	Kurang Optimal
< 60%	Tidak Optimal

Sumber: Litbang Depdagri Republik Indonesia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

**Tabel 3 Target Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Bapenda Kalimantan Timur tahun 2016-2018**

Tahun Anggaran	Target Penerimaan PKB (Rp)
2016	233.000.000.000
2017	232.000.000.000
2018	234.500.000.000

(Sumber : UPT Bapenda wilayah Samarinda, 2021)

Berdasarkan Tabel di atas diketahui Target Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Bapenda wilayah Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016 sebesar Rp 233.000.000.000, tahun 2017 target sebesar 232.000.000.000 tahun 2018 sebesar Rp 234.500.000.000, total Target Pajak Kendaraan Bermotor wilayah Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016-2018 sebesar Rp 699.500.000.000.

**Tabel 4 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Bapenda Kalimantan Timur tahun 2016-2018.**

Tahun	Total Penerimaan PKB
2016	Rp 230.075.556.383
2017	Rp 239.830.998.883
2018	Rp 248.867.660.804

(Sumber : UPT Bapenda wilayah Samarinda, 2021)

Berdasarkan Tabel di atas diketahui Total Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Bapenda wilayah Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016 sebesar Rp 230.075.556.383 pada tahun 2017 sebesar Rp 239.830.998.883, pada tahun 2018 sebesar Rp 248.867.660.804

### PEMBAHASAN

**Tabel 5 Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan PKB tahun 2016- 2018**

Tahun	Target Penerimaan PKB (Rp)	Realisasi Penerimaan PKB (Rp)	Presentase Optimalisasi Realisasi PKB %	Tingkat Optimalisasi
2016	233.000.000.000	230.075.556.383	98,74	Optimal

2017	232.000.000.000	239.830.998.883	103,38	Sangat Optimal
2018	234.500.000.000	248.867.660.804	106,12	Sangat Optimal

(Sumber : Sumber :Upt. Bapenda Samarinda, Data diolah 2021)

Berdasarkan tabel di atas di ketahui untuk tahun 2016 target penerimaan PKB sebesar Rp 233.000.000.000 dengan Realisasi sebesar 230.075.556.383 diperoleh 98,74% dengan kategori Target Realisasi PKB Optimal, pada tahun 2017 target penerimaan PKB sebesar Rp 232.000.000.000 dengan Realisasi sebesar 239.830.998.883 diperoleh presentase sebesar 103,38% dengan kategori Target Realisasi PKB Sangat Optimal, pada tahun 2018 target penerimaan PKB sebesar Rp 234.500.000.000 dengan Realisasi sebesar 248.867.6960.804 diperoleh presentase sebesar 106,12% dengan kategori Target Realisasi PKB Optimal, sehingga Realisasi Target Penerimaan PKB wilayah Samarinda Kalimantan Timur pada tahun 2016-2018 Optimal, karena pengukuran tingkat Optimalisasi non keuangan menggunakan standar yang sesuai dengan acuan Litbang Depdagri Republik Indonesia jika presentase optimalisasi 91-100% maka presentase tersebut di katakan optimal.

Berdasarkan hasil analisis diatas, antara target dengan realisasi setiap tahun mengalami peningkatan dan jika dilihat dari jumlah penerimaan PKB dari tahun 2016-2018 juga mengalami peningkatan, dengan peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT BAPENDA Kalimantan Timur menunjukkan kinerja dalam Realisasi nya sudah sangat Optimal, meskipun pada tahun 2016-2018 jumlah realisasi belum bisa melebihi jumlah target yang ditentukan. UPT BAPENDA Kalimantan Timur harus selalu berupaya untuk Optimalisasi PAD melalui Pajak Kendaraan Bermotor agar bisa melampaui target yang ditentukan, bisa dengan menyediakan samsat di dalam tempat-tempat terpencil , menambah loket fasilitas untuk membantu membayar PKB, atau bisa juga dengan melakukan system autodebit melalui rekening tabungan.

Diketahui bahwa penunggakan dan keterlambatan pembayaran pajak tidak berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak, meskipun terlambat membayar pajak, tetapi masih di tahun yang sama.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **1 SIMPULAN**

Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan diatas, dugaan sementara terhadap suatu masalah penelitian. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan simpulan dari penelitian ini adalah:

1. Tingkat pencapaian target dari penerimaan Pajak Daerah pada Sektor Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 dikatakan Sudah Optimal , sehingga Hipotesis pertama ditolak

2. Tingkat pencapaian target dari penerimaan Pajak Daerah pada Sektor Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 dikatakan Sangat Optimal , sehingga Hipotesis kedua ditolak
3. Tingkat pencapaian target dari penerimaan Pajak Daerah pada Sektor Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 dikatakan Sangat Optimal , sehingga Hipotesis ketiga ditolak

## 2. **Saran**

Setelah melakukan penelitian pada UPT Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, maka peneliti memberikan saran yang sekiranya bermanfaat untuk meningkatkan pencapaian target dalam penerimaan Pajak Daerah Sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Saran yang diberikan peneliti antara lain adalah memperhatikan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup besar terhadap PAD Provinsi Kalimantan Timur, serta upaya lain yang harus dilakukan dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan inovasi dalam pelayanan public sehingga memudahkan masyarakat untuk berperan meningkatkan pemungutan PKB tersebut.

## REFERENCE

- Anonim .2009.Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1 dan 2)  
\_\_\_\_\_.2009.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 12  
\_\_\_\_\_.2009.Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 1 dan 2  
Fahmi, A. Siswanto. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia  
Mahsun, Mohamad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE  
Martono, dan Harjito, D.Agus.2011.*Manajemen Keuangan*.Yogyakarta: Ekonisia  
Fakultas Ekonomi UI